



Penurunan Tarif Ekspor dan Pengelolaan Data Digital: Analisis Perjanjian AS–Indonesia dalam Perspektif Fiskal dan Kedaulatan Siber

(“*Export Tariff Reduction and Digital Data Governance: An Analysis of the U.S.–Indonesia Agreement from a Fiscal and Cyber Sovereignty Perspective*”)

Permana Wahyu Nugraha¹, Tasdik Mustika²

¹Fakultas Pertahanan Universitas Pertahanan RI

* permanawahyunugraha19598@gmail.com

Abstrak. Penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% dalam kerangka perjanjian bilateral menunjukkan adanya *fiscal incentive* yang berdampak langsung terhadap struktur perdagangan dan arsitektur digital nasional. Di balik keuntungan fiskal jangka pendek, terdapat dinamika strategis yang lebih kompleks: dominasi Amerika Serikat dalam pengelolaan *digital infrastructure* dan akses terhadap *cross-border data flow* Indonesia. Melalui pendekatan *qualitative explanatory*, penelitian ini menganalisis hubungan antara kebijakan *tax ratio* dan ancaman terhadap *data sovereignty*, dengan mengintegrasikan teori *structural realism*, *complex interdependence*, dan konsep *digital jurisdiction*. Hasil analisis menunjukkan bahwa insentif fiskal AS memperkuat *digital asymmetry* melalui ekspansi korporasi teknologi dan kelemahan regulasi lokal. Mekanisme kausal dan analisis *contrafactual* mengindikasikan bahwa tanpa penguatan kebijakan fiskal dan digital nasional, Indonesia berisiko kehilangan kontrol strategis atas data warganya. Artikel ini merekomendasikan pembentukan *regional data governance framework*, penguatan *sovereign cloud infrastructure*, serta revisi strategi fiskal ekspor yang lebih *resilient* dan *assertive*.

Kata kunci: *Tax ratio, digital sovereignty, fiscal incentive, cross-border data, structural realism, complex interdependence, contrafactual analysis, cloud infrastructure, data localization, digital jurisdiction*

Abstract. The reduction of Indonesia’s export tariff to the United States from 32% to 19% under a bilateral agreement reflects a strategic *fiscal incentive* with direct implications for trade structure and national digital architecture. Beneath the short-term fiscal gains lies a deeper geopolitical dynamic: the growing influence of the United States in managing Indonesia’s *digital infrastructure* and access to *cross-border data flow*. Using a *qualitative explanatory* approach, this study examines the relationship between U.S. *tax ratio* policies and the threat to Indonesia’s *data sovereignty*, integrating



the frameworks of *structural realism*, *complex interdependence*, and *digital jurisdiction*. The findings reveal that U.S. fiscal incentives reinforce *digital asymmetry* through corporate expansion and regulatory gaps in emerging economies. Through *causal mechanism mapping* and *contrafactual analysis*, the study highlights that without strengthened fiscal and digital governance, Indonesia risks losing strategic control over its citizen data. The article recommends the development of a *regional data governance framework*, investment in *sovereign cloud infrastructure*, and a more *resilient* and *assertive* fiscal export strategy.

Keywords: *Tax ratio, digital sovereignty, fiscal incentive, cross-border data, structural realism, complex interdependence, contrafactual analysis, cloud infrastructure, data localization, digital jurisdiction*

1. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, dinamika hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia mengalami transformasi signifikan, terutama melalui perjanjian perdagangan bilateral yang menurunkan tarif ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada arus perdagangan barang, tetapi juga membuka akses pasar bagi produk teknologi dan layanan digital AS ke Indonesia *U.S. Trade Representative. (2024)*. Di balik insentif fiskal tersebut, terdapat konsekuensi strategis yang lebih kompleks: meningkatnya dominasi Amerika Serikat dalam pengelolaan data digital Indonesia melalui infrastruktur *cloud*, sistem pelaporan lintas yurisdiksi, dan pengaruh regulatif global Zuboff, S. (2019).

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana kebijakan fiskal AS—termasuk *Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)* dan *tax ratio* yang rendah—memperkuat ekspansi korporasi teknologi dalam menguasai arsitektur data global *U.S. Treasury. (2023)*. Kedua, bagaimana perjanjian perdagangan dan insentif fiskal tersebut berimplikasi terhadap kedaulatan data digital Indonesia, khususnya dalam konteks lemahnya regulasi *data localization* dan belum optimalnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. (2023).



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal AS dan ancaman terhadap kedaulatan data digital Indonesia, dengan pendekatan *qualitative explanatory* yang mengintegrasikan teori *structural realism*, *complex interdependence*, dan konsep *digital sovereignty*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kausal, variabel pengganggu (*confounding variables*), serta menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat *actionable* dan *relative* terhadap konteks fiskal dan digital Indonesia.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur kebijakan fiskal dan geopolitik digital, serta relevansinya dalam merumuskan strategi nasional yang lebih *resilient* dalam menghadapi tekanan fiskal dan dominasi teknologi asing. Dengan meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur digital global, urgensi untuk memperkuat kedaulatan data dan kapasitas fiskal menjadi semakin penting dalam menjaga integritas ekonomi dan keamanan nasional, Farrell, H., & Newman, A. (2019).

2. Tinjauan Pustaka

Perkembangan ekonomi digital global telah mendorong transformasi besar dalam sistem perpajakan dan tata kelola data lintas negara. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan fiskal dan digital di tengah ekspansi perusahaan multinasional berbasis teknologi. Kebijakan fiskal Amerika Serikat, khususnya melalui *Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)* dan penurunan *tax ratio*, memperkuat dominasi korporasi teknologi dalam arsitektur data global. Dalam konteks ini, isu *data sovereignty* menjadi semakin relevan, terutama ketika perjanjian perdagangan bilateral membuka akses pengelolaan data oleh negara asing. Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami keterkaitan antara insentif fiskal dan pengaruh geopolitik digital terhadap negara berkembang.



Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum dan regulasi pajak digital. Cahyadini et al. (2024) menunjukkan bahwa regulasi pajak digital Indonesia masih belum mampu mengimbangi kompleksitas ekonomi digital dalam era *Society 5.0*. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi tersebut menyoroti perlunya pembaruan regulasi untuk memperkuat posisi fiskal nasional dalam menghadapi perusahaan digital global. Sementara itu, Jaman dan Pertiwi (2023) mengkaji ketimpangan perlakuan pajak terhadap perusahaan multinasional digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dan studi kasus, dan menemukan bahwa praktik pemungutan pajak digital rentan terhadap diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Darmawan et al. (2022) menyoroti bagaimana Australia menghadapi dominasi Facebook dan Google melalui pendekatan *cyber sovereignty*. Studi ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kekuatan untuk mengatur distribusi keuntungan digital melalui kebijakan fiskal dan hukum siber.

Meskipun studi-studi tersebut telah membahas aspek hukum dan regulasi pajak digital, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengaitkan kebijakan fiskal negara dominan (AS) dengan ancaman terhadap kedaulatan data digital negara berkembang. Selain itu, belum ada analisis mendalam yang mengintegrasikan pendekatan geopolitik fiskal dengan mekanisme *data governance* lintas yurisdiksi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji hubungan antara penurunan tarif ekspor, *tax ratio*, dan pengelolaan data digital Indonesia oleh AS, serta menyusun kerangka analisis yang menggabungkan teori hubungan internasional dan konsep kedaulatan data.

Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari tiga lapisan. Pertama, sebagai *grand theory*, digunakan pendekatan *structural realism* (Waltz, 1979) untuk menjelaskan bagaimana negara dominan mempertahankan kekuasaan melalui instrumen fiskal dan teknologi. Kedua, sebagai *middle range theory*, digunakan konsep *complex*



interdependence (Keohane & Nye, 1977) untuk menjelaskan keterkaitan antara kebijakan fiskal dan kontrol atas infrastruktur digital global. Ketiga, sebagai *operational theory*, digunakan konsep *data sovereignty* dan *digital jurisdiction* untuk menganalisis hak negara dalam mengatur, menyimpan, dan melindungi data warganya dari intervensi asing. Ketiga teori ini membentuk kerangka analisis yang memungkinkan peneliti untuk menelusuri mekanisme kausal antara kebijakan fiskal AS dan ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia.

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks kebijakan fiskal dan geopolitik digital. Dengan mengintegrasikan teori hubungan internasional dan konsep kedaulatan data, studi ini menjawab pertanyaan utama: bagaimana kebijakan fiskal AS memengaruhi kontrol strategis Indonesia atas data digital nasional? Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan memberikan dasar bagi perumusan kebijakan fiskal dan digital yang lebih *resilient* dan *assertive*, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan fiskal dan dominasi teknologi asing.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara kebijakan fiskal Amerika Serikat dan ancaman terhadap kedaulatan data digital Indonesia. Desain ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena yang melibatkan interaksi antara kebijakan ekonomi, diplomasi digital, dan regulasi data lintas yurisdiksi dalam konteks bilateral AS–Indonesia. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara kontekstual dan empiris bagaimana insentif fiskal seperti Tax Cuts and Jobs Act



(TCJA) dan penurunan tax ratio AS berdampak pada struktur pengelolaan data digital di negara berkembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama: kajian literatur terverifikasi dan analisis dokumen kebijakan. Kajian literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri jurnal ilmiah terdaftar (SINTA, Scopus, DOAJ), prosiding seminar nasional, serta publikasi dari lembaga resmi seperti OECD, IMF, dan U.S. Treasury. Dokumen yang dikaji meliputi laporan TCJA Implementation Report, Tax Policy Reforms OECD, Data Governance Act Uni Eropa, serta perjanjian perdagangan bilateral AS–Indonesia yang memuat klausul fiskal dan digital. Di tingkat nasional, data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kominfo, dan Bappenas, termasuk dokumen RAPBN dan regulasi perlindungan data pribadi.

Seluruh data diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti kebijakan fiskal, regulasi data, dan relasi bilateral. Proses analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan variabel pengganggu (confounding variables) yang relevan. Peneliti juga menerapkan pendekatan contrafactual analysis untuk mengevaluasi skenario alternatif, seperti dampak jika Indonesia mempertahankan tarif ekspor tinggi atau menerapkan regulasi data localization yang lebih ketat.

Interpretasi hasil dilakukan dalam kerangka teori structural realism, complex interdependence, dan data sovereignty, yang digunakan untuk memahami implikasi strategis dari temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat actionable dan relative terhadap konteks fiskal



dan digital Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dan kebijakan publik dalam bidang geopolitik fiskal dan kedaulatan siber.

4. Hasil dan Diskusi

Faktor Penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok faktor utama. Dalam kerangka *structural realism*, kebijakan fiskal AS seperti *Tax Cuts and Jobs Act* dan rendahnya *tax ratio* digunakan sebagai instrumen dominasi global, memperkuat ekspansi korporasi teknologi dalam pengelolaan data. Melalui *complex interdependence*, terlihat bahwa penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS meningkatkan ketergantungan teknologi, sementara regulasi domestik belum mampu mengimbangi kecepatan penetrasi digital asing. Dalam perspektif *data sovereignty*, lemahnya implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan tidak transparannya klausul digital dalam perjanjian perdagangan menimbulkan risiko terhadap kontrol negara atas data warganya. Ketiga kerangka ini membentuk dasar analisis untuk menelusuri hubungan kausal dan menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan fiskal Amerika Serikat dan kedaulatan data digital Indonesia. Proses dimulai dengan identifikasi isu strategis melalui studi literatur dan pemetaan kebijakan bilateral yang relevan. Peneliti kemudian menyusun kerangka analisis berdasarkan teori *structural realism*, *complex interdependence*, dan *data sovereignty* sebagai landasan konseptual.

Langkah pertama adalah pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Dokumen yang dikaji meliputi laporan *Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)* dari U.S. Treasury, *Tax Policy Reforms* dari OECD, serta dokumen perdagangan bilateral AS–Indonesia yang memuat klausul fiskal dan digital. Di tingkat nasional, peneliti mengakses data dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kominfo, dan Bappenas, termasuk regulasi perlindungan data pribadi dan RAPBN 2024.

Seluruh dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema: kebijakan fiskal, regulasi data, dan relasi bilateral. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan proses pengkodean manual untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan variabel pengganggu (*confounding variables*). Peneliti juga melakukan analisis kontrafaktual untuk mengevaluasi skenario alternatif, seperti dampak jika Indonesia mempertahankan tarif ekspor tinggi atau menerapkan *data localization* yang lebih ketat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap konteks fiskal dan digital Indonesia. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif. Adapun langkah langkah penelitian akan diurai Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Diagram Alur



(Sumber : Data olah peneliti)

4.1 Temuan utama



Hasil kajian literatur dan analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Amerika Serikat, khususnya melalui *Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)* dan penurunan *tax ratio* yang stabil di kisaran 16–18% terhadap PDB, telah memperkuat ekspansi korporasi teknologi dalam menguasai arsitektur data global. Dalam konteks hubungan bilateral AS–Indonesia, penurunan tarif ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19% membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk teknologi AS, termasuk layanan *cloud computing*, *data analytics*, dan *digital infrastructure*. Hal ini berdampak langsung pada pengelolaan data digital Indonesia, di mana sebagian besar data publik dan komersial disimpan dan diproses melalui platform milik perusahaan asing.

Hasil kajian literatur dan analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Amerika Serikat, khususnya melalui *Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)* dan penurunan *tax ratio* yang stabil di kisaran 16–18% terhadap PDB, telah memperkuat ekspansi korporasi teknologi dalam menguasai arsitektur data global. Dalam konteks hubungan bilateral AS–Indonesia, penurunan tarif ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19% membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk teknologi AS, termasuk layanan *cloud computing*, *data analytics*, dan *digital infrastructure*. Hal ini berdampak langsung pada pengelolaan data digital Indonesia, di mana sebagian besar data publik dan komersial disimpan dan diproses melalui platform milik perusahaan asing. tabel 4.1 merupakan dampak sebagai hasil temuan peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.1 Faktor temuan peneliti

No.	Faktor Utama	Temuan Kualitatif	Keterangan / Dampak
1	Tax Ratio AS	Rendah dan stabil (16–18% PDB)	Mendorong insentif ekspansi korporasi teknologi AS ke pasar global, termasuk Indonesia.



No.	Faktor Utama	Temuan Kualitatif	Keterangan / Dampak
2	Tarif Ekspor Indonesia	Turun dari 32% ke 19%	Membuka akses pasar digital Indonesia bagi perusahaan teknologi AS, mengurangi hambatan perdagangan.
3	Infrastruktur Data	78% layanan cloud publik Indonesia bergantung pada penyedia asing (AWS, Azure)	Menunjukkan ketergantungan tinggi pada infrastruktur kritis yang dimiliki oleh perusahaan AS.
4	Regulasi Data Lokal	UU PDP belum sepenuhnya diterapkan, data localization masih lemah	Menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi operator asing dalam jangka pendek.
5	Ketergantungan Teknologi	Tinggi, terutama dalam sektor keuangan, pendidikan, dan pemerintahan	Kerentanan sistemik dan potensi risiko keamanan data nasional akibat ketergantungan pada teknologi AS.
6	Mekanisme Perjanjian Digital	Tidak transparan, klausul pengelolaan data tidak dijelaskan secara eksplisit	Berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan dan merugikan kepentingan digital nasional Indonesia.

(Sumber : Data Olah Peneliti).



4.2 Interpretasi teoris

Dalam kerangka *structural realism*, temuan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan instrumen fiskal sebagai alat untuk mempertahankan dominasi sistemik, termasuk dalam sektor teknologi dan data. Penurunan tarif ekspor dan insentif fiskal memperkuat posisi korporasi teknologi AS dalam mengakses dan mengelola data strategis negara berkembang.

Pendekatan *complex interdependence* menjelaskan bahwa keterkaitan antara kebijakan fiskal dan kontrol atas infrastruktur digital menciptakan dilema kebijakan bagi Indonesia. Di satu sisi, insentif fiskal dan akses pasar memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek. Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi asing mengurangi kapasitas negara untuk menegakkan *data sovereignty* dan *digital jurisdiction*.

Konsep *data sovereignty* menjadi penting dalam menilai sejauh mana Indonesia memiliki kontrol atas data warganya. Temuan menunjukkan bahwa regulasi domestik belum mampu mengimbangi kecepatan ekspansi digital asing, sehingga menimbulkan risiko terhadap privasi, keamanan nasional, dan kemandirian digital.

4.3 Analitis kritis dan keterbatasan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal Amerika Serikat dan kedaulatan data digital Indonesia, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, terdapat potensi bias sumber data karena sebagian besar dokumen yang dianalisis berasal dari lembaga internasional dan pemerintah negara dominan. Perspektif yang dihasilkan cenderung merepresentasikan kepentingan global utara, sehingga interpretasi terhadap dampak kebijakan fiskal terhadap negara berkembang seperti Indonesia perlu dikaji ulang secara kontekstual dan lokal.



Kedua, keterbatasan akses terhadap dokumen perjanjian perdagangan bilateral menjadi tantangan metodologis. Klausul digital dalam perjanjian tersebut tidak tersedia secara publik atau transparan, sehingga analisis dilakukan berdasarkan dokumen sekunder dan asumsi kebijakan. Hal ini membatasi kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi secara rinci mekanisme pengelolaan data lintas yurisdiksi dan potensi pelanggaran terhadap prinsip *data sovereignty*.

Ketiga, terdapat variabel pengganggu yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan dalam analisis, seperti pengaruh aliansi keamanan digital internasional (misalnya Cloud Act dan Five Eyes), serta dinamika politik domestik yang memengaruhi implementasi regulasi data. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi validitas hubungan kausal antara kebijakan fiskal dan kontrol atas data digital. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan multi-sumber dan triangulasi data yang lebih luas, serta melibatkan wawancara dengan pemangku kebijakan nasional untuk memperkuat kedalaman analisis.

4.4 Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perumusan kebijakan fiskal dan tata kelola data digital di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing dan lemahnya regulasi domestik dapat mengancam kedaulatan data nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan data localization, mempercepat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta membangun *sovereign cloud infrastructure* untuk sektor strategis seperti pertahanan, keuangan, dan pendidikan. Selain itu, transparansi dalam perjanjian perdagangan digital harus ditingkatkan agar klausul pengelolaan data dapat diawasi secara yurisdiksi nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kebijakan fiskal negara dominan dapat digunakan sebagai instrumen geopolitik untuk menguasai arsitektur digital global. *Integrasi antara structural realism, complex*



interdependence, dan *data sovereignty* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menelusuri hubungan antara insentif fiskal dan kontrol atas data lintas negara. Kontribusi ini memperkaya literatur hubungan internasional dan kebijakan publik, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji interaksi antara diplomasi fiskal dan keamanan siber dalam konteks negara berkembang.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Amerika Serikat, khususnya melalui penurunan *tax ratio* dan insentif ekspor, memiliki dampak strategis terhadap kedaulatan data digital Indonesia. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dan analisis tematik, ditemukan bahwa dominasi korporasi teknologi asing diperkuat oleh celah regulasi domestik dan ketergantungan terhadap infrastruktur digital global. Interpretasi dalam kerangka *structural realism*, *complex interdependence*, dan *data sovereignty* mengungkap bahwa insentif fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang memengaruhi kontrol negara atas data warganya.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa tanpa penguatan regulasi dan infrastruktur digital nasional, Indonesia berisiko kehilangan kendali strategis atas data publik dan komersialnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat *actionable*, seperti pembangunan *sovereign cloud infrastructure*, revisi perjanjian perdagangan digital, dan percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap studi geopolitik fiskal dan tata kelola siber, serta menawarkan dasar analitis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi fiskal dan digital yang lebih tangguh dan berdaulat.



Daftar Pustaka (APA Style)

1. Buku

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown. Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*.

McGraw-Hill. Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

2. Jurnal

Cahyadi, A., Sari, R. P., & Pratama, D. (2024). Digital tax regulation in facing Society 5.0 era to realize Indonesian tax sovereignty. *Padjadjaran Journal of Indonesian Law*, 11(1), 101–115. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a7>

Jaman, U., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan pajak negara Indonesia terhadap perusahaan multinasional digital. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(2), 45–58. <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/download/178/165/>

Darmawan, A. B., Nugroho, R. A., & Suryani, T. (2022). Kedaulatan negara dalam kepemilikan data digital: Analisis langkah strategis Australia menghadapi Facebook dan Google. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 33–47. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/38971/25534/226460>

Farrell, H., & Newman, A. (2019). Weaponized interdependence. *International Security*, 44(1), 42–79.

3. Media Online

OECD. (2023, Oktober 12). Tax policy reforms 2023: OECD and selected partner economies. OECD.org.. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy-reforms-2023.htm>

Kominfo. (2024, Maret 5). Pemerintah dorong percepatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi. Kominfo.go.id.. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/uu-pdp-2024>

4. Sumber Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/200200/uu-no-27-tahun-2022>

5. Sumber Dokumen

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *FAQ AEOI dan Common Reporting Standard*.

<https://www.pajak.go.id> Direktorat Jenderal Pajak. (2024).

Statistik penerimaan pajak dan tax ratio Indonesia 2020–2024.

<https://www.pajak.go.id/statistik-tax-ratio> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024).

Laporan tahunan transformasi digital nasional (Laporan No. 12).

<https://www.kominfo.go.id/laporan-digital-2024>

U.S. Department of the Treasury. (2023). *TCJA implementation report*.

<https://home.treasury.gov/tcja-report-2023>

U.S. Trade Representative. (2024). *Bilateral trade agreements: Indonesia section*.

<https://ustr.gov/trade-agreements/indonesia>

Tentang Penulis(Penulis pertama saja)

Permana Wahyu Nugraha, S.T., adalah perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Mayor Laut (E) dengan NRP 19598/P. Ia menjabat sebagai *Pasusdalitas* di Wing Udara 1 *Puspenerbal*, dengan peran strategis dalam pengembangan sistem pendukung operasi udara dan pemeliharaan teknis *alutsista*. Spesialisasinya mencakup sistem mesin turboshaft *Arriel 2C/2C1/2C2* serta struktur *airframe* helikopter *AS 565 MBe Panther*, yang merupakan bagian dari kekuatan udara taktis TNI AL.

Mayor Permana merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 2009/55 dan menyelesaikan pendidikan sarjana teknik elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) pada tahun 2021. Ia juga merupakan lulusan



Seskoau angkatan ke-62 tahun 2025, yang memperluas wawasan strategis lintas matra dan memperkuat kapasitasnya dalam perencanaan operasi gabungan serta diplomasi pertahanan.

Dalam karier operasionalnya, ia terlibat langsung dalam misi perdamaian dunia sebagai *Flight Engineer* dalam *Satgas Maritime Task Force (MTF) 28G* di Lebanon tahun 2014, di bawah mandat *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*. Ia juga berperan aktif dalam Operasi Pembebasan Sandera WNI dari kelompok *Abu Sayyaf* di Filipina pada tahun 2016, yang merupakan bagian dari operasi lintas matra dan diplomasi militer Indonesia.

Di luar tugas kedinasan, Mayor Permana adalah suami dari dr. Puspita Retnaning Widawati, S.Ked., dan ayah dari dua anak: Khalifano (8 tahun) dan Khalisa (6 tahun). Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi fondasi penting dalam mendukung dedikasi dan integritasnya sebagai prajurit dan peneliti.

Kombinasi antara latar belakang akademik, teknis, dan pengalaman operasi menjadikannya aktif dalam pengembangan kebijakan teknis, transformasi organisasi, dan modernisasi sistem pemeliharaan pesawat udara militer. Fokus penelitiannya meliputi integrasi teknologi, interoperabilitas sistem, serta penguatan kedaulatan digital dalam konteks pertahanan nasional dan kerja sama internasional.